

KLIPPING BERITA MEDIA MASSA



Kamis, 4 April 2019



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Kompas (Halaman, 15)	Kamis, 4 April 2019	Hunian Layak untuk Ribuan Warga Papua	Kementerian PUPR merealisasikan penyediaan dan rehabilitasi hunian yang layak bagi masyarakat Papua selama setahun terakhir. Total sebanyak 305 unit rumah dibangun dan rumah milik 5.500 keluarga direhabilitasi.
2	Bisnis Indonesia (Halaman, 8)	Kamis, 4 April 2019	Kawasan Ekonomi Khusus Pangandaran Ditolak	Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa pengajuan Kawasan Ekonomi Khusus Pangandaran ditolak oleh pusat. Pada pengajuan awal 2019, Pangandaranditolak karena kawasan tersebut tidak boleh 100% dikhususkan untuk hanya pariwisata.
3	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Kamis, 4 April 2019	2 Tahun, Normalisasi Sungai Terhenti	Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa sampai dengan saat ini tidak ada kegiatan normalisasi sungai yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
4	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Kamis, 4 April 2019	Kondisi 30 PDAM Diupayakan Sehat	Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum menargetkan penyehatan kinerja 30 perusahaan daerah air minum sepanjang 2019.
5	Bisnis Indonesia (Halaman, 5)	Kamis, 4 April 2019	Memperjelas Misi OBOR	Pasalnya, banyak negara yang mencurigai bahwa ada muatan politis di balik Inisiatif Belt and Road (OBOR) yang dicanangkan oleh presiden Xi Jinping tersebut.
6	Bisnis Indonesia (Halaman, 2)	Kamis, 4 April 2019	Tetap Memprioritaskan Infrastruktur	Ketika jalan tol Merak hingga Banyuwangi nyaris terhubung, tercipta harapan bahwa arus barang dan jasa akan semakin lancar. Jawa, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, masih memiliki peluang bergerak lebih cepat dan menciptakan pusat-pusat perekonomian baru.

Judul	Hunian Layak untuk Ribuan Warga Papua	Tanggal	Kamis, 4 April 2019
Media	Kompas (Halaman, 15)		
Resume	Kementerian PUPR merealisasikan penyediaan dan rehabilitasi hunian yang layak bagi masyarakat Papua selama setahun terakhir. Total sebanyak 305 unit rumah dibangun dan rumah milik 5.500 keluarga direhabilitasi.		

Hunian Layak untuk Ribuan Warga Papua

JAYAPURA, KOMPAS — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merealisasikan penyediaan dan rehabilitasi hunian yang layak bagi masyarakat Papua selama setahun terakhir. Total sebanyak 305 unit rumah dibangun dan rumah milik 5.500 keluarga direhabilitasi.

Kepala Satuan Non-vertikal Tertentu (SNVT) Provinsi Papua Malikidin Soltip mengatakan, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR melalui SNVT melaksanakan dua program sepanjang tahun 2018. Program itu meliputi Rumah Khusus dengan pembangunan 305 unit rumah di 16 kabupaten dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk merehabilitasi rumah milik 5.500 keluarga di 19 kabupaten.

Program Rumah Khusus diberikan kepada masyarakat dengan kategori berpenghasilan rendah. Mereka mendapatkan rumah tipe 36 yang dilengkapi dengan ventilasi udara, kamar mandi, dan instalasi listrik. Sementara program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya memberikan dana Rp 15 juta untuk rehabilitasi rumah warga di daerah pesisir dan Rp 30 juta bagi warga di pegunungan Papua.

"Target program Rumah Khusus dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berdasarkan usulan dari pemda di daerah-daerah tersebut. Kedua program ini sangat membantu Pemprov Papua dalam pemenuhan hunian yang layak dan nyaman bagi masyarakat di daerah pedalaman," kata Malikidin di Jayapura, Papua, Rabu (3/4/2019).

Ia menyampaikan, sebelum adanya kedua program tersebut, kondisi rumah warga sangat memprihatinkan. Rata-rata tim SNVT Papua menemukan di rumah-rumah itu tidak ada kamar mandi dan ventilasi udara.

"Kondisi rumah yang tidak layak dan tidak sehat menyebabkan warga rentan sakit, seperti infeksi saluran pernapasan dan diare. Dengan kedua program ini, kami berharap kualitas kesehatan masyarakat dapat meningkat," tuturnya.

Tahun ini, SNVT Papua akan tetap melaksanakan program Rumah Khusus, tetapi hanya di lima kabupaten. Kelima daerah itu meliputi Nabire, Biak Numfor, Puncak Jaya, Jayawijaya, dan Boven Digoel.

"Program Rumah Khusus pada tahun ini sebanyak 175 unit. Sementara program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya masih untuk 19 kabupaten dengan target 3.000 unit yang diperbaiki pada tahap pertama. Menurut rencana, kami akan menambah jumlah yang direhabilitasi hingga 12.000 unit rumah pada tahap kedua," tambahnya.

Apresiasi

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua, Thomas Sondegau, mengapresiasi kedua program tersebut sebab menjawab kebutuhan masyarakat di daerah pedalaman. Kedua program ini juga berperan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.

Diketahui bahwa hingga tahun 2017, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua menempati peringkat ke-34 dengan poin 59,09. Angka ini berada di bawah standar nasional, yakni 70,81. Tiga unsur penilaian IPM meliputi kesehatan, tingkat pendidikan, dan standar kehidupan atau ekonomi.

"Kedua program ini membuktikan bahwa perhatian pemerintah pusat tidak hanya membangun jalan dan jembatan di Papua. Kebutuhan warga untuk mendapatkan rumah yang layak juga terpenuhi," ujar Thomas. (FLO)

Judul	Kawasan Ekonomi Khusus Pangandaran Ditolak	Tanggal	Kamis, 4 April 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 8)		
Resume	Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa pengajuan Kawasan Ekonomi Khusus Pangandaran ditolak oleh pusat. Pada pengajuan awal 2019, Pangandaranditolak karena kawasan tersebut tidak boleh 100% dikhususkan untuk hanya pariwisata.		

Kawasan Ekonomi Khusus Pangandaran Ditolak

Bisnis, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memperbaiki sejumlah persyaratan agar pengajuan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Pangandaran disetujui pemerintah pusat.

redaksi@bisnis.com

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa pengajuan kawasan ekonomi khusus Pangandaran ditolak oleh pusat. Pada pengajuan awal 2019, Pangandaran ditolak karena kawasan tersebut tidak boleh 100% dikhususkan untuk hanya pariwisata.

"Harus ada komponen lain. Jadi pariwisata dan teknologi maritim, mudah-mudahan bisa lolos dalam 2 bulan ini," katanya di Bandung, Selasa (2/4).

Menurutnya, komite KEK meminta tambahan agar Pangandaran tidak mutlak menjadi lokasi pariwisata tetapi ada misi pendidikan.

Oleh karena itu, dalam perbaikan persyaratan ke depan, bersama Pemkab Pangandaran dan pengelola, Pemprov Jabar akan memberi porsi 80% bagi pariwisata dan 20% teknologi kemaritiman. "Kita sudah paham [kekurangannya], bayi pertama butuh penyesuaian," ujarnya.

Disinggung soal Cikidang, Sukabumi yang lebih siap jadi KEK, pihaknya menilai, bisa saja kawasan tersebut lebih dahulu ditetapkan sebagai KEK. Menurutnya, antara Pangandaran dan Cikidang hanya masalah penjadwalan, bukan perbedaan perlakuan atau prioritas. "Dua-duanya difokuskan, ini masalah penjadwalan saja dan masalah administrasi," katanya.

Di tempat yang sama, Menteri Pariwisata Arief Yahya berjanji, akan mengawal khusus penetapan

KEK Pangandaran dan KEK Cikidang agar bisa ditetapkan pada tahun ini. Menurutnya, paling realistis pada September mendatang status tersebut sudah bisa didapatkan. "Yang pertama paling KEK Cikidang karena ada dua industri di sana, yaitu pariwisata dan pendidikan tinggi. Untuk Pangandaran menjadi pariwisata dan kemaritiman," ujarnya.

Dari pengalaman penetapan KEK di wilayah lain, waktu 6 bulan cukup agar dua kawasan tersebut segera menyandang status KEK.

Menpar membantah jika awalnya status dua KEK tersebut bisa diraih pada Maret 2019 lalu, karena saat itu hanya menjanjikan mengawal seluruh persyaratan masuk. "Ternyata semua persyaratan secara administrasi sudah, setelah persyaratan paling cepat 3 bulan [ditetapkan] tetapi saya tidak berani, 6 bulan saja," paparnya.

Dia mengungkapkan bahwa pengajuan dari Jawa Barat sama tepat waktunya dengan Sulawesi Utara yang seluruh persyaratan selesai pada Maret. Namun, dia memilih mempercepat pengajuan Sulawesi Utara, karena lebih yakin kesiapan di

► Komite KEK meminta tambahan agar Pangandaran tidak mutlak menjadi lokasi pariwisata tetapi ada misi pendidikan.

daerah. Jadi, Arief menjanjikan bahwa khusus pengajuan dari Jawa Barat akan dikawal secara pribadi. "Saya kawal sendiri, hari ini saya instruksikan untuk membentuk tim, ketuanya adalah Menpar," tegasnya.

Tim ini, menurutnya, akan mengawal hanya sampai pembahasan di tingkat KEK. Kementerian Pariwisata selanjutnya setelah matang akan ditembuskan ke Kementerian Perekonomian.

Selain Cikidang dan Pangandaran, tim ini juga akan mengawal usulan KEK lain yang datang dari Jawa Barat, seperti KEK Aerocity Kertajati, KEK Walini, KEK Jatigede, dan KEK Pulau Pesisir Cirebon. "Bukan hanya Cikidang dan Pangandaran saja," ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Taufiq B.S memastikan bahwa pemerintah pusat meminta seluruh dokumen terkait dengan KEK Pangandaran harus diperbaiki seluruhnya.

"Intinya pemerintah provinsi dan pihak pemrakarsa telah memberikan dokumen pada Dewan KEK, pusat. Saya dapat informasi, Pangandaran diminta dibahas ulang," katanya.

Salah satu *item* perbaikan yang harus dilakukan adalah pusat meminta agar ada agenda pariwisata internasional disiapkan di Pangandaran. "Penekannya pada kegiatan pariwisata yang skalanya internasional. Yang sebetulnya secara substansi itu perlu dielaborasi dalam laporan yang sudah dibuat, itu saja," katanya.

Taufiq menjelaskan bahwa pengembalian dokumen tersebut tidak disertai tenggat berapa lama perbaikan harus selesai.

Namun, pihaknya memastikan, sudah menyiapkan langkah strategis agar pengusungan KEK Pangandaran bisa segera terwujud. (A57) 

Profil KEK Pangandaran



Sumber: Pemprov Jabar, 2019

BISNIS/RADITYO ENO



Judul	2 Tahun, Normalisasi Sungai Terhenti	Tanggal	Kamis, 4 April 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa sampai dengan saat ini tidak ada kegiatan normalisasi sungai yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.		

2 Tahun, Normalisasi Sungai Terhenti

Krizia P. Kinanti
krizia.putri@bisnis.com

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa sampai dengan saat ini tidak ada kegiatan normalisasi sungai yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kegiatan normalisasi sungai yang seharusnya dikerjakan pemerintah pusat berhenti sejak 2 tahun terakhir. Ya, [terhenti] karena tidak ada pembebasan lahan," ujarnya menjawab pertanyaan *Bisnis*, pekan lalu.

Menurut Basuki, pengendalian banjir di Ibu Kota sebetulnya merupakan konsep atau janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sementara itu, bagi Kementerian PUPR, normalisasi sungai seperti yang sudah dikerjakan di Sungai

► **Kementerian PUPR mempertanyakan pengertian naturalisasi versi Pemprov DKI.**

Ciliwung yakni dengan menata dan melebarkan sungai tersebut.

"Kami ingin kolaborasi, tetapi kami *pergen nanya* yang dimaksud oleh [Gubernur] DKI naturalisasi sungai itu *opo?* Kami undang sudah dua kali, yang datang stafnya yang tidak mengerti. Kami menunggu," ujarnya.

Basuki menjelaskan bahwa apabila makna naturalisasi sudah jelas, berarti tidak perlu dilakukan



tender dan tinggal Pemerintah Provinsi DKI melaksanakan saja. "Dialokasikan anggarannya melalui sisa tender atau anggaran tahun 2020, tetapi pasti jalan dulu itu konsepnya *multiyears contract*."

Basuki menambahkan bahwa bantaran sungai, Waduk Ciawi, Waduk Sukamahi, dan sodetan adalah proyek-proyek yang harus dilaksanakan dalam rangka pengendalian banjir.

"Sodetan ini janji tahun ini akan dilakukan secara komitmen sudah mengiyakan, kita tunggu beliau [Gubernur DKI Anies Baswedan] turun lapangan aja," ujarnya.

ADA ANGGARAN

Berdasarkan catatan *Bisnis* per Februari 2018, ketika itu, Gubernur DKI Anies Baswedan belum memutuskan untuk melanjutkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung meskipun Dinas Tata Air DKI memberi sinyal melanjutkan proyek tersebut.

Kepala Dinas Tata Air DKI ketika itu, Tegun Hendrawan, mengatakan bahwa sudah ada anggaran untuk pembebasan lahan.



Banjir Masih Terus Mengintai Warga Jakarta

Banjir menjadi momok bagi sebagian penduduk Jakarta. Ketika memasuki musim penghujan, warga Ibu Kota, khususnya di bantaran kali, sudah harus bersiap-siap menghadapi datangnya banjir. Meski banjir datang dan pergi dengan cepat, tetapi frekuensinya bisa berulang. Pemerintah pun membuat sejumlah kebijakan untuk menanggulangi banjir. Sayangnya, proyek itu kini tak berjalan sesuai dengan perkiraan.

Proyek Penanganan Banjir di Jakarta dan Sekitarnya*

► Waduk Ciawi I & Sukamahi

- Kebutuhan Lahan: 79 ha dan 13 ha
- Kapasitas: 11,8 juta meter kubik dan 2,4 juta meter kubik
- Biaya: Rp1,9 triliun
- Masa pembangunan: 2 tahun-3 tahun
- Kendala: Topografi (tanah lembek), tinggi tanggul tidak maksimal, dan pembebasan lahan, koordinasi antara pemerintah wilayah.

► Sodetan Ciliwung-Cisadane

- Panjang 2,9 km
- Biaya: Rp1,5 triliun

- Masa pembangunan: 3 tahun
- Kendala: Koordinasi dengan Pemprov Banten, pembebasan lahan, koordinasi antara pemerintah wilayah.

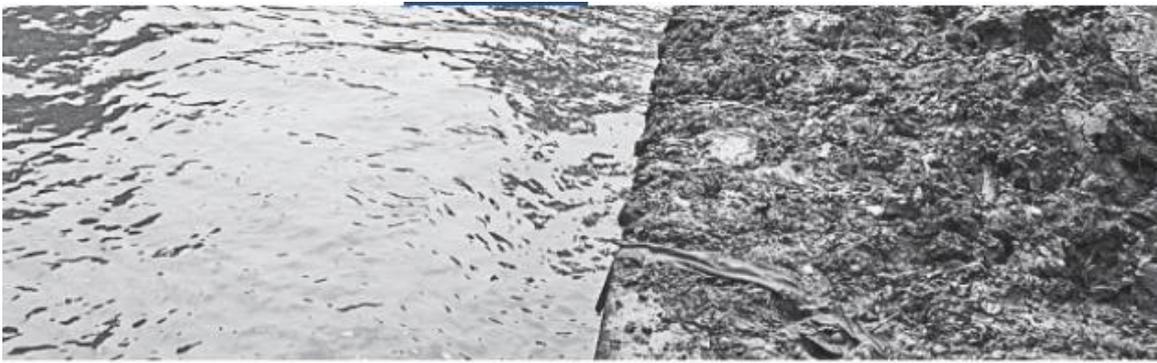
► Multipurpose Deep Tunnel

- Panjang: 29 km
- Kapasitas: 250 meter kubik per detik
- Biaya: Rp30 triliun
- Masa pembangunan: 50 tahun
- Kendala: Tidak layak, pembangunan butuh waktu lama, biaya yang terlalu besar, ditolak oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Sumber: Dari berbagai sumber diolah

Ket. *) Perhitungan awal 2014

BISNIS/RADITYO ENO



Foto/Antara

“Seperti saya sampaikan progres normalisasi tetap lanjut karena sudah dianggarkan sebesar Rp1,30 triliun,” tegasnya. (*Bisnis*, 10 Feb. 2018)

Berdasarkan data APBD DKI 2018, pagu anggaran untuk Program Pengendalian Banjir dengan nomor kegiatan 1.03.01.019 pengadaan tanah sungai/saluran sebesar Rp853,30 miliar.

Adapun, sisanya sebesar Rp500 miliar dialokasikan untuk pembebasan lahan waduk, situ, dan embung. “Masih lanjut *kok*. Kami akan lakukan percepatan pembebasan lahan.”

Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah memberi sinyal bahwa pemprov akan melanjutkan program normalisasi Sungai Ciliwung bersama Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

“Normalisasi sungai menjadi solusi penanganan banjir Jakarta karena bisa mengembalikan fungsi sungai,” kata Saefullah.

Tugas Pemprov DKI dalam proyek tersebut adalah membebaskan lahan bantaran kali yang saat ini dibangun rumah dan bangunan liar lainnya.

Setelah lahan bebas, BBWSCC dapat membangun konstruksi berupa turap atau *sheet pile* dan jalan inspeksi.

Namun, Saefullah tak menampik bahwa banyak hal yang menghambat proses pembebasan lahan di Ciliwung.

“Yang bikin lama itu proses administrasinya. Alat dasar untuk mengecek hak atas tanah kan sertifikat. Kalau sertifikatnya jelas ya, langsung di-*appraisal*, bayar. *Cespleng*,” jelasnya.

Justru, Saefullah menambahkan bahwa yang banyak terjadi di bantaran Ciliwung, warga yang tinggal tidak memiliki sertifikat yang sah.

Oleh karena itu, Dinas Tata Air DKI harus berhati-hati dalam mengecek administrasi, termasuk asli atau tidaknya sertifikat yang dimiliki warga.

Gubernur DKI Anies Baswedan belum menunjukkan ketegasan atas kelanjutan proyek normalisasi.

Saat itu, Anies memilih istilah naturalisasi sungai dan membenarkan jika hal itu merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi banjir. Namun, dia tetap enggan berkomentar lebih jauh soal kelanjutan normalisasi.

“*Enggak* mau. Nanti. Sampai situ dulu. Saya *enggak* mau berkontroversi dulu lah. Kita *beresin* dulu soal pengungsinya. Kita amankan,” tegasnya. (*Zufrizal*)

Judul	Kondisi 30 PDAM Diupayakan Sehat	Tanggal	Kamis, 4 April 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum menargetkan penyehatan kinerja 30 perusahaan daerah air minum sepanjang 2019.		

Kondisi 30 PDAM Diupayakan Sehat

Bisnis, JAKARTA — Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum menargetkan penyehatan kinerja 30 perusahaan daerah air minum sepanjang 2019. Dalam 5 tahun ke depan, seluruh perusahaan daerah air minum di Indonesia diharapkan memiliki kinerja yang sehat.

Kepala Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Bambang Sudiatmo mengatakan bahwa pihaknya setiap tahun melakukan evaluasi kinerja yang menghasilkan tiga golongan PDAM, yaitu sehat, kurang sehat, dan sakit.

Pada 2018, sebanyak 18 perusahaan daerah air minum (PDAM) berhasil meningkatkan kinerja dari kurang sehat menjadi sehat dan dari sakit

menjadi kurang sehat.

Dari laporan kinerja 2018, saat ini tercatat ada 223 PDAM berkategori sehat, 99 kurang sehat, dan 52 sakit.

Bambang menuturkan bahwa setiap tahun, BPPSPAM menargetkan peningkatan kinerja 30—40 PDAM yang masih sakit atau kurang sehat menjadi sehat. “Dalam 5 tahun ke depan, semua PDAM dalam kondisi sehat,” ujar Bambang, Selasa (2/4).

Menurutnya, BPPSPAM bakal fokus memberi bantuan pendampingan bagi PDAM untuk memperbaiki delapan aspek yang mendera PDAM.

Kedelapan aspek itu yakni peningkatan jam operasi pelayanan, pemenuhan tarif *full cost recovery* (FCR), penurunan tingkat kehilangan air,

efisiensi produksi, peningkatan konsumsi air, penggantian meteran air, peningkatan cakupan pelayanan, dan peningkatan kompetensi pegawai.

Bambang menjelaskan bahwa BPPSPAM bersinergi dengan lembaga donor, asosiasi, dan pemangku kepentingan lain dalam program pemenuhan akses air minum.

Sinergi diperlukan agar program pemenuhan akses air minum tidak tumpang tindih. Lewat sinergi, setiap pemangku kepentingan melibatkan PDAM setempat dalam program peningkatan kapasitas maupun pendampingan teknis.

Anggota BPPSPAM Unsur Penyelenggara Henry Limbong menambahkan bahwa pemerintah daerah harus mendukung penuh upaya peningkatan ki-

nerja PDAM.

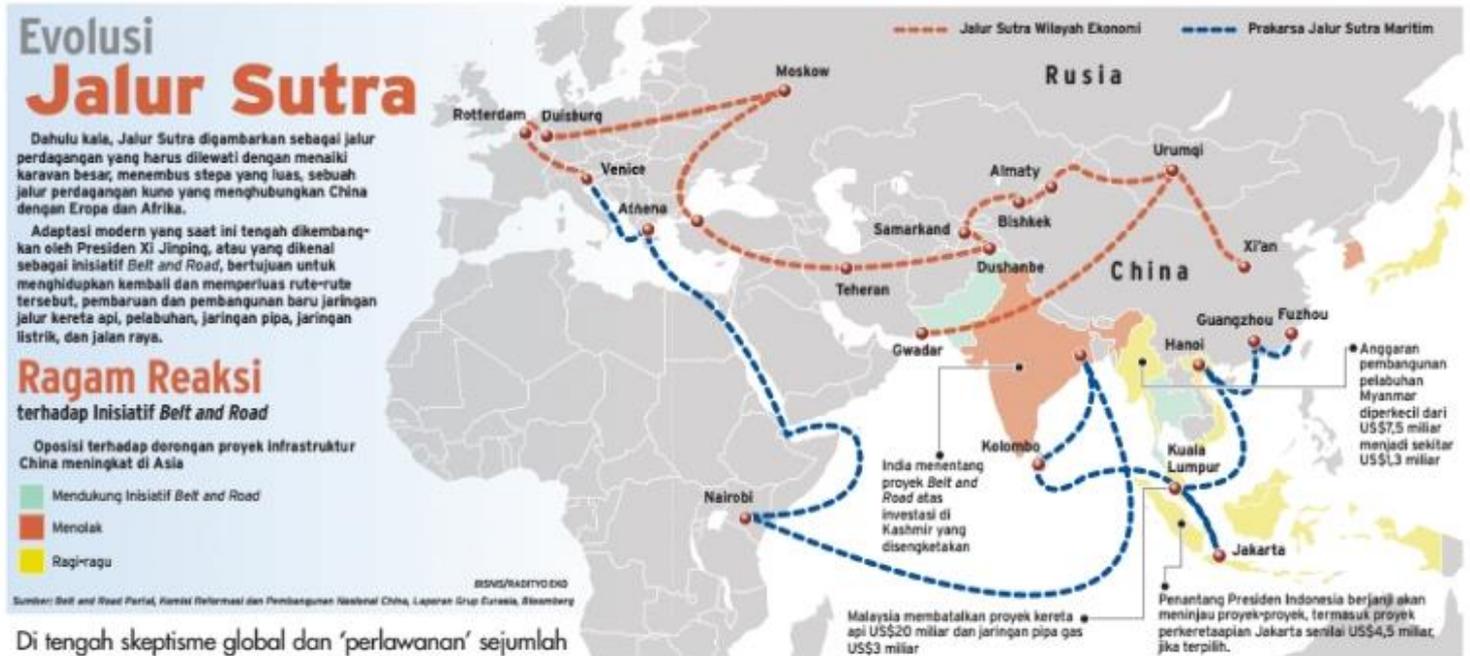
Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah yang rendah menjadi salah satu penyebab penyehatan PDAM berjalan lambat. “Permasalahannya kompleks, setiap PDAM juga berbeda persoalannya. Komitmen pemda juga ada yang tidak jelas sehingga PDAM dibiarkan saja, padahal itu tanggung jawab pemda.”

Di sisi lain, BPPSPAM juga mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menghentikan tren pemekaran PDAM sejalan dengan pemekaran daerah.

Menurutnya, PDAM tidak perlu memisahkan diri kendati administrasi wilayahnya berpisah. Pemekaran membuat skala keekonomian PDAM menjadi tidak layak. *(Rivki Maulana)*

Judul	Memperjelas Misi OBOR	Tanggal	Kamis, 4 April 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 5)		
Resume	Pasalnya, banyak negara yang mencurigai bahwa ada muatan politis di balik Inisiatif Belt and Road (OBOR) yang dicanangkan oleh presiden Xi Jinping tersebut.		

Memperjelas Misi OBOR



Di tengah skeptisme global dan 'perlawanan' sejumlah negara terhadap program Jalur Sutra modern yang diusung oleh China alias Inisiatif *Belt and Road*, Pemerintah China dikabarkan tengah menyusun aturan untuk memperjelas definisi program yang sebenarnya merupakan pengembangan jalur ekonomi.

Nirmala Aninda
redaksi@bisnis.com

Pasalnya, banyak negara yang mencurigai bahwa ada muatan politis di balik Inisiatif *Belt and Road* atau *One Belt, One Road* (OBOR) yang dicanangkan oleh Presiden Xi Jinping tersebut.

Beberapa sumber yang familiar dengan informasi ini mengatakan bahwa rencana tersebut belum final, tetapi regulasi ini akan berfungsi untuk mencegah perusahaan menyalahge-

► **Proyek OBOR diluncurkan pada 2013 untuk membangun kembali rute kuno jalur sutra yang melintasi Eurasia.**

nakan label 'inisiatif *Belt and Road*' dalam kegiatan investasi.

Menurut mereka, penggunaan label atas nama proyek pemerintah yang tidak diautorisasi tersebut telah menciptakan kebingungan tentang ruang lingkup dari inisiatif ini dan merusak reputasinya di luar negeri.

"Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional China [NDRC] sedang mengerjakan daftar proyek-proyek inisiatif *Belt and Road* yang resmi diakui oleh Pemerintah China. Ini akan mencakup perusahaan milik negara dan perusahaan swasta, membantu pihak berwenang meningkatkan regulasi proyek," ujar seorang sumber yang tidak disebutkan namanya, seperti dikutip melalui Bloomberg, Rabu (3/4).

NDRC dan Kementerian Luar Negeri China tidak segera memberikan tang-

gapan atas pertanyaan yang dikirimkan oleh Bloomberg.

Xi meluncurkan proyek modern ini untuk membangun kembali rute perdagangan kuno melintasi Eurasia pada 2013.

Akan tetapi, masih ada ketidakpastian tentang proyek apa saja yang dianggap sebagai bagian dari inisiatif *Belt and Road*.

Adapun, China tengah berupaya untuk melawan kritik terhadap program besutan Presiden Xi di tengah munculnya kekhawatiran terkait dengan potensi beban utang yang akan membuat negara lain rentan terhadap tujuan strategis Beijing yang lebih luas.

Sebelumnya Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence telah memperingatkan negara-negara Asia-Pasifik pada November, untuk tidak mengambil uang dari China. Dia juga memperingatkan bahwa AS tidak akan menawarkan program serupa.

Negara di seluruh Asia saat ini tengah menilai kembali manfaat investasi China.

Malaysia sedang berada dalam proses pembicaraan dengan China untuk mengurangi nilai proyek kereta api sebesar US\$20 miliar yang dibatalkan

setelah Perdana Menteri Mahathir Mohamad berkuasa.

Sementara itu, Myanmar tengah berupaya untuk memotong nilai dari kesepakatan pembangunan pelabuhan yang disepakati di bawah rezim sebelumnya. Di sisi lain, Maladewa yang memiliki catatan utang cukup banyak, baru saja melengserkan pemerintahan pro-China pada tahun lalu.

Xi yang sedang bersiap untuk menjadi tuan rumah bagi 40 pemimpin dunia pada Forum *Belt and Road* kedua di Beijing pada akhir April, menyatakan bahwa proyek yang dia usung diwarnai oleh skeptisme global.

"Inisiatif *Belt and Road* dipahami sebagai sebuah misi politik daripada program nasional, karena program ini tidak memiliki daftar negara anggota dan definisi yang tepat tentang apa yang dimaksud dari proyek tersebut," menurut laporan 2017 dari firma hukum Baker McKenzie.

Meski demikian, China telah berusaha untuk menekankan partisipasi yang beragam dan menawarkan miliaran bantuan utang ke negara-negara Afrika dalam upaya untuk melawan kritik bahwa fokus program adalah penyebaran pengaruh politik Xi.

"*Belt and Road* adalah inisiatif untuk kerja sama ekonomi, alih-alih aliansi geopolitik atau liga militer, dan ini merupakan proses yang terbuka dan inklusif, bukan sebuah bentuk blok eksklusif atau 'klub China,'" kata Xi dalam sebuah simposium pada Agustus tahun lalu.

Pekan lalu, China bersama Italia menandatangani kesepakatan kerja sama, di mana kesepakatan ini akan menjadikan Italia sebagai negara pertama anggota G7 yang akan tergabung dalam proyek infrastruktur raksasa "*Belt and Road*".

"Kami ingin merevitalisasi Jalur Sutra agar dapat menjadi lebih baik dan membagikan manfaat dari kemajuan umat manusia," kata Xi usai bertemu dengan Presiden Italia Sergio Mattarella P. beberapa waktu lalu di Roma, Italia.

Nota kesepahaman ini akan mendorong kerja sama yang lebih kuat untuk meningkatkan konektivitas antara Asia dan Eropa dalam berbagai sektor termasuk kesugan.

Kesepakatan ini juga mengangkat poin terkait keuangan, perdagangan, perubahan iklim, dan prinsip Eropa terhadap kerja sama dengan China. ■

Judul	Tetap Memprioritaskan Infrastruktur	Tanggal	Kamis, 4 April 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 2)		
Resume	Ketika jalan tol Merak hingga Banyuwangi nyaris terhubung, tercipta harapan bahwa arus barang dan jasa akan semakin lancar. Jawa, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, masih memiliki peluang bergerak lebih cepat dan menciptakan pusat-pusat perekonomian baru.		

Tetap Memprioritaskan Infrastruktur

Ketika jalan tol Merak hingga Banyuwangi nyaris terhubung, tercipta harapan bahwa arus barang dan jasa akan semakin lancar. Jawa, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, masih memiliki peluang bergerak lebih cepat dan menciptakan pusat-pusat perekonomian baru.

Ketika jalan tol Trans-Sumatra satu persatu mulai diresmikan, harapan lebih besar bisa kita gantungkan, perekonomian Sumatra akan bergerak jauh lebih cepat. Kita bisa menjaga harapan bahwa pada 2024, jalur tol yang menghubungkan Lampung hingga Aceh akan menyatu.

Ini bukan soal cerita sukses sebuah kebijakan untuk menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas, tetapi sebuah langkah awal yang hasilnya masih akan diuji kelak. Namun, kita tetap memerlukan sebuah langkah pertama untuk sampai pada sebuah tujuan. Kita memerlukan keteguhan di atas rata-rata.

Apalagi, melihat ketersediaan infrastruktur di Indonesia yang belum sepadan dengan pertumbuhan masyarakat, terbuka peluang pertumbuhan ekonomi yang tak

terkira. Ini adalah sebuah kesempatan tidak saja bagi industri konstruksi, tetapi juga industri properti, manufaktur, dan perdagangan yang akan tumbuh bersama terbangunnya jalur dan titik infrastruktur baru.

Baru pada periode lima tahun terakhir ini, kita bisa merasakan gairah pembangunan infrastruktur begitu kentara. Jalan tol saling terhubung, pelabuhan dibangun, dan bandar udara berdiri. Indonesia memang sudah terlalu lama tertinggal, bahkan untuk bisa memiliki jalur kereta api bawah tanah saja, harus menunggu hingga 35 tahun.

Namun, dengan hasil lima tahun ini tentu jauh dari cukup, karena baru sebagian kecil sarana dan prasarana perekonomian terbangun. Siapapun presiden terpilih pada 17 April nanti, semestinya tetap menjadikan pembangunan infrastruktur ini sebagai prioritas.

Prioritas pembangunan infrastruktur ini sebaiknya menjadi konsensus kedua calon presiden sebagaimana mereka juga bersepakat pada Pancasila adalah ideologi negara.

Keberlanjutan prioritas pada infrastruktur ini penting tidak bagi perekonomian Indonesia ke depan,

tetapi juga berkah bagi industri konstruksi. Pada periode di mana pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur, adalah masa panen perusahaan konstruksi, baik BUMN maupun swasta.

Pada saat yang sama, kapasitas industri semestinya meningkat karena terbukanya lapangan baru untuk berinovasi. Prioritas pemerintah pada infrastruktur adalah titik ungit sangat besar bagi tumbuhnya investasi di masa yang akan datang.

Kritik terbesar dari proyek-proyek infrastruktur adalah ketersediaan biaya dan anggapan proyek dibangun secara ugal-ugalan. Namun, keduanya tetap bisa disediakan sebuah alasan bahwa hanya dalam situasi terjepit, kreativitas muncul dan sinyal kehati-hatian bisa segera dinyalakan.

Keterbatasan biaya semestinya juga memacu pemerintah untuk memperbesar sumber penerimaan melalui intensifikasi pajak. Apalagi rasio pajak terhadap produk domestik bruto termasuk yang terendah di Asia Tenggara.

Oleh karena itu, sungguh merupakan harapan salah satu calon presiden yang sedang berkampanye menyebut akan menaikkan rasio

pajak hingga 16% jika terpilih. Itu sama artinya dengan kita memiliki sumber pembiayaan pembangunan jauh lebih besar dari sekarang.

Harian ini perlu menggarisbawahi bahwa prioritas terhadap pembangunan infrastruktur ini mesti berlanjut. Walaupun petahana yang terpilih, sudah semestinya infrastruktur terus dibangun, tetapi bila terpilih presiden baru sekalipun, melanjutkan pembangunan infrastruktur adalah keniscayaan.

Masalah sumber pendanaan, dengan tren penerimaan negara yang terus meningkat dan bahkan penerimaan negara melampaui target—sesuatu yang jarang terjadi—maka harapan itu ada. Apalagi Indonesia mampu mempertahankan tren pertumbuhan ekonomi cukup tinggi.

Kritik juga mesti dipandang sebagai pelecuk dalam memacu diri, seperti dalam hal BUMN Karya yang menerima penugasan pemerintah untuk kreatif dalam mengelola keuangan. Hanya dengan menjaga keuangan tetap sehat, arus kas tersedia, penugasan pemerintah bisa dijalankan dan pembangunan infrastruktur bisa berlanjut. 